



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan: <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Kementerian BUMN RI,2. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN RI,3. Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI,4. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero),5. Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	25 (dua puluh lima)
Hari/Tanggal	:	Rabu, 19 Juli 2017
W a k t u	:	Pukul 11.00 s.d. 13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Bowo Sidik Pangarso ((Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PPG) didampingi oleh: <ol style="list-style-type: none">1. Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN),2. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Gerindra),3. H. Inas Nasrullah Zubir, B.E., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Hanura)
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas: <ol style="list-style-type: none">1. Usulan Tambahan PMN pada APBNP Tahun Anggaran 2017 untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) serta pengalihan penggunaan PMN TA. 2015,2. Progres penggunaan dana PMN PT Adhi Karya (Persero) Tahun 2015,3. Penjelasan jawaban tertulis atas pertanyaan lisan anggota Komisi VI DPR RI yang disampaikan dalam RDP tanggal 18 Juli 2017 mengenai data kajian PMN TA 2017, dan bisnis plan.
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none">1. 34 dari 49 Anggota Komisi VI DPR RI,2. Sekretaris Kementerian BUMN RI,3. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN RI diwakili oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha,4. Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI,

5. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero),
6. Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Sekretaris Kementerian BUMN RI, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN RI diwakili oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dibuka pukul 11.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDP pada hari Rabu, 19 Juli 2017 dalam rangka membahas:
 - a. Usulan Tambahan PMN pada APBNP Tahun Anggaran 2017 untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana *Light Rail Transit* (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) serta pengalihan penggunaan PMN TA. 2015.
 - b. Progres penggunaan dana PMN PT Adhi Karya (Persero) Tahun 2015.
 - c. Penjelasan jawaban tertulis atas pertanyaan lisan anggota Komisi VI DPR RI yang disampaikan dalam RDP tanggal 18 Juli 2017 mengenai data kajian PMN TA 2017, dan bisnis plan.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Sekretaris Kementerian BUMN RI, para Deputi Kementerian BUMN RI, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang menjadi agenda RDP.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Sekretaris Kementerian BUMN RI, para Deputi Kementerian BUMN RI, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI akan membahas usulan tambahan PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada APBNP TA 2017 dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana *Light Rail Transit* Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek) sebesar Rp2 triliun serta pengalihan penggunaan PMN TA 2015 sebesar Rp2 Triliun, sesuai surat Menteri BUMN RI Nomor S-401/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017, dalam Rapat Intern Komisi VI DPR RI sebelum Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI atau Menteri yang mewakili.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB.